

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA DI DESA BINA BARU KECAMATAN KULO KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

Sarina¹, Monalisa Ibrahim², Hardianti³

Administrasi Publik, Universitas Muhammdiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: sarinanasir224@gmail.com

Email: monalisa2231@gmail.com; hardianti@umsrappang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of policy implementation on the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Bina Baru Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency. The method used is a quantitative descriptive approach, with a sample of 88 respondents selected using a purposive sampling technique. Data collection was carried out through observation, questionnaires, documentation, and literature studies. Data analysis used quantitative descriptive techniques with the help of the SPSS program and a Likert scale. The results of the study show that the policy implementation variable obtained a percentage of 67% which is in the good category, while the Village-Owned Enterprise management variable obtained a percentage of 75% which is also in the good category. The factors that influence the management of Village-Owned Enterprises in Bina Baru Village as a whole are in the good category with an average percentage of 70%. The highest factor is community participation with a percentage of 75%. While the lowest factor is human resources with a percentage of 64%.

Keywords: Implementation, Policy, Village-Owned Enterprises.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan jumlah sampel 88 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan bantuan program SPSS serta skala Likert. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan memperoleh persentase sebesar 67% yang berada pada kategori baik, sedangkan variabel pengelolaan Badan Usaha Milik Desa memperoleh persentase sebesar 75% yang juga berada pada kategori baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bina Baru secara keseluruhan berada pada kategori baik dengan persentase rata-rata sebesar 70%. Faktor tertinggi adalah partisipasi masyarakat dengan persentase sebesar 75%. Sedangkan faktor terendah adalah sumber daya manusia dengan persentase sebesar 64%.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Badan Usaha Milik Desa.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi lokal. Pemerintah menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, di mana berbagai instrumen kebijakan dikembangkan untuk mendorong kemandirian desa. Salah satu instrumen strategis tersebut adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa melalui pengelolaan aset dan pengembangan unit usaha sesuai karakteristik lokal. Peran BUMDes

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

145

Indexed



semakin penting karena diharapkan tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan.

Keberadaan BUMDes memiliki landasan legal yang kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa desa berwenang membentuk BUMDes sebagai pengelola kekayaan desa yang dipisahkan untuk menjalankan usaha ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang menetapkan BUMDes sebagai badan hukum serta memberikan pedoman operasional meliputi struktur organisasi, kepengurusan, mekanisme pengelolaan aset dan modal, pengembangan unit usaha, hingga sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2016 tentang aspek teknis pendirian dan tata kelola BUMDes, termasuk struktur organisasi, prosedur pengelolaan, dan pola pembinaan serta pengawasan yang berlaku secara lokal. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa menjadi landasan hukum operasional dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan potensi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Grindle keberhasilan proses implementasi kebijakan bergantung pada kegiatan program yang direncanakan dengan baik dan jumlah dana yang cukup untuk mencapai hasil yang diharapkan. Grindle menekankan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua komponen penting, yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi). Implementasi kebijakan dikatakan berhasil jika dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh para penyusunnya dan mampu mencapai tujuan kebijakan yang telah dirumuskan (Ahmad Rosandi Sakir 2025). Menurut Georgy R. Terry pengelolaan merupakan bagian dari manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Valentino a. Lakumani, 2023).

Berdasarkan hasil observasi awal, pengelolaan BUMDes belum berjalan optimal. Kondisi ini ditunjukkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan usaha, belum tersedianya alur kerja yang jelas, lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta terbatasnya unit usaha yang dikelola yang masih berfokus pada penyewaan kursi dan penjualan tabung gas. Akibatnya, potensi ekonomi desa belum dimanfaatkan secara optimal. Temuan ini didukung oleh penelitian Fatimah dan Yuliana (2024) yang menunjukkan bahwa kinerja BUMDes belum berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat akibat keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya koordinasi. Selain itu, penelitian Sudirman, Monalisa, dan Erfina (2021) menemukan bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes masih berada pada kategori kurang baik, terutama dalam fungsi sebagai motivator, fasilitator, dan mediator. Penelitian ini menjadi urgen untuk dilaksanakan karena BUMDes di Desa Bina Baru hingga kini belum mampu berfungsi secara optimal sebagai penggerak ekonomi desa, sementara potensi ekonomi desa yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kekosongan penelitian terletak pada belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi kebijakan sebagai variabel utama yang memengaruhi pengelolaan BUMDes, khususnya dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan seperti isi kebijakan dan konteks kebijakan. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung melihat BUMDes sebagai entitas manajerial atau ekonomi, bukan sebagai hasil dari suatu proses kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah desa. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta menjadi rujukan bagi desa lain dalam mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yang lebih efektif dan berkelanjutan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu pendekatan yang menggambarkan variabel secara apa adanya berdasarkan data berupa angka dari keadaan sebenarnya (Sumanto dkk, 2025). Populasi berjumlah 113 tokoh masyarakat Desa Bina Baru, dengan sampel 88 responden yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling* menggunakan rumus Slovin dengan margin eror 5% (Sugiono 2023). Data dikumpulkan melalui observasi dan kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics 21 melalui uji validitas, reliabilitas, uji t, uji F, dan regresi linear sederhana. Untuk menjawab keseluruhan hipotesis pada penelitian ini dilakukan uji regresi linear sederhana dengan persamaan:

$$Y = a + Bx$$

PEMBAHASAN**Karakteristik Responden****Tabel 1: Karakteristik Responden**

Deskripsi Responden	Keterangan	Jumlah	Persentase
Berdasarkan Jenis Kelamin	Laki-laki	42	48%
	Perempuan	46	52%
Total		88	100%
Berdasarkan Usia	18-35	47	53%
	36-46	21	24%
	47-55	15	17%
	56-60	5	6%
Total		88	100%
Berdasarkan Tingkat Pendidikan	SD	17	19%
	SMP	19	22%
	SMA	41	47%
	S1	10	11%
	S2	1	1%
Total		88	100%

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, April 2026

Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa**Tabel 2: Rekapitulasi Indikator Implementasi Kebijakan**

No	Indikator Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa	Persentase (%)
1	Isi Kebijakan	78%
2	Pengaruh Kepentingan	63%
3	Tipe Manfaat	62%
4	Derajat Perubahan	64%
5	Letak Pengambilan Keputusan	62%
6	Pelaksanaan Program	71%
7	Sumber Daya yang dilibatkan	68%
8	Konteks Kebijakan	68%
9	Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yg terlibat	67%
10	Karakteristik lembaga dan penguasa	69%
11	Kepatuhan dan daya tanggap	70%
	Jumlah	742%
	Persentase	67%

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Merujuk pada teori Merilee S. Grindle (Subarsono, 2021:93), implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat *implemenbility* dari kebijakan tersebut. Derajat tersebut ditentukan dua indikator, yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan mencakup: isi kebijakan, pengaruh kepentingan, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan Konteks kebijakan mencakup: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap. Pengukuran terhadap kesebelas indikator ini pada masyarakat Desa Bina Baru menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berada pada kategori baik dengan rata-rata persentase sebesar 67%. Indikator tertinggi adalah isi kebijakan dengan persentase 78% sedangkan indikator terendah adalah tipe manfaat dan letak pengambilan keputusan masing-masing dengan persentase 62%, mengindikasikan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat dan proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan BUMDes masih perlu mendapat perhatian lebih agar dapat berjalan lebih optimal. Rata-rata keseluruhan implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bina Baru berada pada persentase 67% yang termasuk dalam kategori baik.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Pengelolaan pada dasarnya merujuk pada serangkaian proses yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengelolaan dipahami sebagai upaya mengarahkan aktivitas organisasi secara terstruktur, sehingga setiap bagian mampu menjalankan perannya dengan selaras dan berkesinambungan (Bakhrudin All Habsy et al. 2024). Merujuk pada teori Georgy R Terry, pengelolaan merupakan salah satu kerangka dasar dalam memahami bagaimana proses manajerial dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif (Neri Wijayanti 2023).

Tabel 3: Rekapitulasi Indikator Implementasi Kebijakan

No	Indikator Pengelolaan Baadan Usaha Milik Desa	Persentase (%)
1	Perencanaan	85%
2	Pengorganisasian	73%
3	Pelaksanaan	70%
4	Pengendalian	70%
	Jumlah	298%
	Persentase	75%

Berdasarkan tabel rekapitulasi indikator pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di atas, indikator dengan capaian tertinggi adalah perencanaan dengan persentase 85% yang berada pada kategori baik, menunjukkan bahwa penyusunan rencana kerja BUMDes di Desa Bina Baru sudah dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan baik. Sebaliknya, indikator pelaksanaan dan pengendalian masing-masing dengan persentase 70% menjadi indikator terendah, mengindikasikan bahwa realisasi program dan mekanisme pengawasan dalam pengelolaan BUMDes masih perlu mendapat perhatian lebih agar dapat berjalan lebih optimal. Rata-rata keseluruhan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bina Baru berada pada persentase 75% yang termasuk dalam kategori baik.

Implementasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Hasil uji kualitas instrument menunjukkan bahwa seluruh item variable X dan variable Y memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga seluuth item dinyatakan valid. Reliabilitas instrument juga menunjukkan hasil yang baik dengan nilai Cronbach's Alpha variable X sebesar 0,718 dan variable Y sebesar 0,740, keduanya melampaui batas minimal 0,60. Dan tidak terdapat data yang dikeluarkan (exclude).

Tabel 4: Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji Statistik	Nilai	Keterangan
Person Correlation (r)	0.367	Hubungan Positif

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

148

Indexed

SINTA 4



PKP|INDEX



Sig. (2-tailed)	0,000 (<0,001)	Signifikan
Koefisien Determinasi (R^2)	0,135 (13,5%)	Kontribusi X terhadap Y
Persamaan Regresi	$Y = 4,795 + 0,189X$	Positif & signifikan
Uji-t (t hitung)	$3,634 > t \text{ tabel } 1,988$	H_0 diterima

Sumber: Olah Data SPSS 21, 2026

Berdasarkan table 3 persamaan regresi yang dihasilkan adalah $Y = 4,795 + 0,189X$. Nilai $R = 0,367$ menunjukkan adanya hubungan positif antara implementasi kebijakan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Koefisien determinasi $R^2 = 0,135$ menunjukkan bahwa 13,5% variasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat dijelaskan oleh implementasi kebijakan, sedangkan 86,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil uji F menghasilkan nilai 13,204 (sig. 0,000 < 0,05) dan uji t menghasilkan nilai t hitung $3,634 > t \text{ tabel } 1,988$, sehingga implementasi kebijakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dua indikator faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes berada pada kategori **baik** dengan rata-rata capaian sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes di Desa Bina Baru sudah cukup mendukung keberlangsungan dan pengembangan BUMDes di tingkat desa.

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kegiatan BUMDes di Desa Bina Baru sudah berjalan dengan baik dan menjadi faktor pendukung utama dalam keberlangsungan pengelolaan BUMDes. Namun masih diperlukan peningkatan partisipasi yang lebih merata dari seluruh lapisan masyarakat agar potensi ekonomi desa dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menunjukkan bahwa ketersediaan dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengelola dan menjalankan kegiatan usaha BUMDes di Desa Bina Baru sudah cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan. Kurangnya kompetensi dan pengalaman pengelola dalam manajemen kelembagaan masih menjadi faktor penghambat dalam mengoptimalkan pengelolaan BUMDes secara profesional dan berkelanjutan

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan memperoleh capaian 67% dan pengelolaan BUMDes 75%, keduanya berkategori baik, yang mengindikasikan bahwa peningkatan implementasi kebijakan berbanding lurus dengan kualitas pengelolaan BUMDes di Desa Bina Baru; (2) Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan BUMDes berkategori baik dengan rata-rata 70%, dengan partisipasi masyarakat sebagai faktor tertinggi (75%) dan sumber daya manusia sebagai faktor terendah (64%). Berdasarkan temuan tersebut, disarankan: (1) Pemerintah Desa Bina Baru perlu memperkuat koordinasi pemangku kepentingan dan meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes melalui pelatihan berkala; (2) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memberikan pendampingan intensif dan mendorong partisipasi masyarakat demi peningkatan kesejahteraan desa.

REFERENSI

Ahmad Rosandi Sakir, Naifa Nabila Silawane. 2025. Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Berbasis Dana Desa Di Indonesia : Analisis Model Isi Kebijakan Dan Lingkungan. *Pena bangsa: bisnis dan tata kelola publik adaptif* 1(2): 12–26.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

- All Habsy, Bakhrudin et al. 2024. Memahami Konsep Dasar Organisasi Dan Manajemen. *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 3(12): 5319–32.
- Fatimah, Fatimah, and Yuliana Yuliana. 2024. Pengaruh Kinerja Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5(1): 15–21.
- Neri Wijayanti, Febrian Arif Wicaksana. 2023. Implementasi Fungsi Manajemen George R. *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 3(2023): 30–43.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Subarsono, A G. 2021. Pustaka Pelajar, Jogjakarta *Analisis Kebijakan Publik, Teori Dan Aplikasi*. 1st ed. Pustaka Pelajar.
- Sudirman, Dedi, Monalisa Ibrahim, and Erfina Erfina. 2021. Peranan Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bina Baru Kacamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi* 9(2): 73–77.
- Sugiono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Cetakan Ke. ALFABETA, cv.
- Sumanto, Mardinawati, Teguh Budi Santoso, Budhi Adhiani Christina, Maharani Rona Makom. 2025. Optimalisasi pemanfaatan artificial intelligence di kalangan mahasiswa gen-z pada proses pembelajaran. *Jurnal aktual akuntansi bisnis terapan* 8(1): 1–17.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Valentino a. Lakumani, femmy m. G. Tulusan, Rully Mambo. 2023. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik* 9(4): 572–79.